

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Dampaknya Bagi Kemiskinan di Sumba

I Made Artha Nadhi^{1*}, Adrianus Kabubu Hudang², Yuniarti Reny Renggo³

^{1*,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

Jl. R. Suprpto No.35, Prailiu, Waingapu, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

*e-mail : imadearthanadhi@gmail.com

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

17 June 2025

Revised :

20 June 2025

Accepted :

3 July 2025

Kata Kunci :

Pengeluaran Pemerintah,
Pendidikan, Kesehatan,
Indeks Pembangunan
Manusia, Kemiskinan

Keywords :

*Government Expenditure,
Education, Health, Human
Development Index, Poverty*

Kemiskinan merupakan permasalahan struktural yang masih menjadi tantangan utama di wilayah tertinggal seperti Pulau Sumba. Maksud dari riset ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, serta untuk mengeksplorasi pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data panel yang mencakup empat kabupaten di Pulau Sumba selama periode 2019 hingga 2024. Data yang digunakan diperoleh dari laporan resmi Badan Pusat Statistik dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi data panel melalui pendekatan efek tetap, yang ditentukan berdasarkan hasil uji Chow dan Hausman. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan memiliki dampak positif serta signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan investasi pada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan secara nyata mampu mendorong pembangunan manusia dan menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memfokuskan kebijakan anggaran pada sektor-sektor tersebut secara lebih terarah dan berkelanjutan.

The Effect of Government Spending on the Education & Health Sector and the Human Development Index on Poverty in Sumba

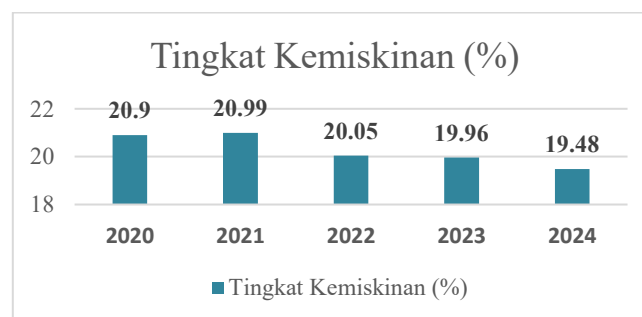
ABSTRACT

Poverty is a structural problem that is still a major challenge in underdeveloped areas such as Sumba Island. The purpose of this research is to analyze how government spending in the education and health sectors affects the Human Development Index, as well as to explore its effect on poverty levels. This study uses a quantitative method with panel data covering four districts on Sumba Island during the period 2019 to 2024. The data used was obtained from

the official report of the Central Statistics Agency and the Regional Revenue and Expenditure Budget document. The analysis in this study was carried out using panel data regression through a fixed-effect approach, which was determined based on the results of the Chow and Hausman test. The results obtained show that government spending on the education and health sectors has a positive and significant impact on the increase in the Human Development Index. In addition, the Human Development Index has a negative and significant effect on the poverty rate. These findings indicate that increased investment in basic services such as education and health is likely to drive human development and reduce poverty rates. Therefore, local governments need to focus budget policies on these sectors in a more targeted and sustainable manner.

PENDAHULUAN

Salah satu isu krusial yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah kemiskinan. Kondisi ini terjadi ketika individu atau kelompok tidak memiliki akses atau sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Hal ini tentu memengaruhi kualitas hidup mereka secara signifikan, menghambat perkembangan sosial dan ekonomi, serta memperburuk ketimpangan dalam masyarakat. Situasi ini sering dipicu oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pendapatan, tingginya angka pengangguran, serta terbatasnya akses terhadap peluang ekonomi dan sosial. Selain itu, kemiskinan juga dapat diperburuk oleh kesenjangan sosial yang tinggi dan kurangnya kebijakan pemerintah yang mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai dampaknya, kemiskinan tidak hanya memengaruhi kualitas hidup individu, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara secara keseluruhan. Kemiskinan bukan hanya memengaruhi kualitas hidup seseorang, tetapi juga berdampak pada perkembangan ekonomi serta kestabilan sosial di suatu negara. Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program pembangunan dalam beberapa dekade terakhir, yang mencakup sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Meski demikian, kemiskinan di wilayah-wilayah tertentu, terutama di daerah terpencil dan tertinggal seperti Pulau Sumba di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), masih tetap tinggi.



Sumber: BPS NTT (2024).

Gambar 1. Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur (2020 - 2024)

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat sebesar 19,48%. Angka ini lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan nasional yang hanya sekitar

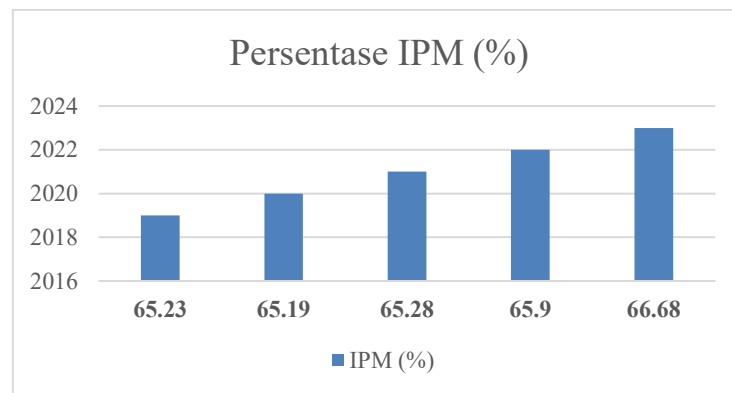
9,03%. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat di NTT menghadapi berbagai tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Tingginya tingkat kemiskinan ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup individu, tetapi juga berdampak pada terbatasnya peluang ekonomi, meningkatnya kesenjangan sosial, serta rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tersebut. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di NTT adalah keterbatasan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air bersih. Banyak daerah di NTT yang masih terisolasi secara geografis, sehingga sulit dijangkau oleh program pembangunan pemerintah. Hal ini diperburuk dengan kondisi iklim yang cenderung kering, yang memengaruhi produktivitas sektor pertanian sebagai salah satu sumber penghidupan utama masyarakat setempat. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya fasilitas kesehatan yang memadai juga menjadi hambatan besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Akbar and Arifin 2023).

Kemiskinan di Pulau Sumba disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, minimnya pelayanan kesehatan, kurangnya kesempatan kerja, dan kondisi geografis yang terpencil sehingga menyulitkan pembangunan infrastruktur yang memadai (Hafiz and Kurniadi 2024; Marianti and Fillaili 2022). Sumba memiliki banyak desa yang berada di pelosok dengan akses jalan yang sulit, serta layanan kesehatan dan pendidikan yang terbatas. Situasi ini menyebabkan masyarakat Sumba memiliki kualitas hidup yang rendah, dan upaya peningkatan kesejahteraan menjadi lebih sulit untuk dicapai dibandingkan daerah-daerah yang memiliki akses infrastruktur yang lebih baik. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah, terutama dalam hal alokasi anggaran di sektor-sektor yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup, seperti pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan sebagian besar dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari upaya mengurangi angka kemiskinan dalam jangka panjang (Carolina 2022). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anggaran pendidikan setidaknya harus mencakup 20% dari total APBN. Di sisi lain, sejak tahun 2009, sektor kesehatan juga mendapatkan perhatian khusus dengan alokasi minimal 5% dari APBN, dan proporsi ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, di tingkat daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga difokuskan pada pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan untuk mendukung pemerataan layanan dasar. Kebijakan ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah-daerah tertinggal seperti Sumba, dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup mereka. Meski anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan semakin besar, masih ada pertanyaan besar mengenai apakah alokasi anggaran ini benar-benar berdampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan, terutama di wilayah seperti Sumba. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas distribusi dan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ialah alat ukur yang dirancang guna mengevaluasi tingkat kualitas hidup manusia di suatu wilayah tertentu (Izzah and Hendarti 2021). Tiga dimensi utama yang menjadi fokus dalam IPM meliputi kesehatan, yang dilihat dari angka harapan hidup; pendidikan, yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; serta kesejahteraan ekonomi, yang direpresentasikan oleh pendapatan per kapita. Dengan menggabungkan ketiga dimensi ini, IPM memberikan gambaran

menyeluruh mengenai keberhasilan pembangunan manusia, sekaligus menjadi acuan penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.



Sumber: BPS NTT (2024).

Gambar 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT (2019 - 2023)

Berdasarkan data BPS tahun 2023, IPM NTT tercatat sebesar 66,68, terdapat jauh di bawah skor nasional yang senilai 74,39. Di Sumba, IPM yang rendah menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Rendahnya IPM ini mencerminkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut memiliki akses terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, yang secara langsung berdampak pada tingkat kemiskinan yang tinggi. Jika IPM tidak meningkat, maka peluang untuk menurunkan angka kemiskinan juga menjadi lebih sulit tercapai.

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh pendidikan, yang berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat memberikan peluang bagi individu untuk memperoleh keterampilan yang lebih baik, membuka akses ke pekerjaan yang lebih layak, dan meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu aspek fundamental dalam memutuskan siklus kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan memberikan akses pendidikan yang layak, masyarakat dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Aini and Islamy 2021). Dengan pendidikan yang baik, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai guna bekerja atau menciptakan usaha yang produktif, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, di Sumba, pendidikan masih menjadi tantangan besar. Sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, serta tingkat partisipasi sekolah yang rendah menjadi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di daerah ini. Dalam situasi ini, pemerintah perlu memastikan bahwa pengeluaran di sektor pendidikan benar-benar diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat Sumba. Melalui program-program pendidikan yang tepat sasaran, diharapkan dapat terjadi peningkatan kemampuan masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Kesehatan memegang peranan yang tidak kalah penting dibandingkan pendidikan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Faktor kesehatan masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas dan kualitas hidup seseorang. Ketika kesehatan terjaga dengan baik, individu dapat bekerja dengan lebih maksimal dan menjalani kehidupan yang lebih sejahtera. Oleh karena itu, investasi dalam bidang kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pemutusan rantai kemiskinan (Idris Thahir et al. 2021). Ketika masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan,

mereka memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Dengan demikian, mereka dapat terus berkontribusi dalam kegiatan ekonomi secara produktif. Ketersediaan layanan kesehatan yang baik berperan penting dalam memastikan kesejahteraan fisik, yang pada gilirannya mendukung stabilitas ekonomi. Sayangnya, layanan kesehatan di Sumba masih terbatas. Banyak desa di wilayah ini yang tidak memiliki puskesmas atau klinik yang memadai, dan akses ke layanan kesehatan sering kali terhalang oleh buruknya kondisi jalan serta minimnya tenaga medis. Kondisi ini membuat masyarakat di Sumba lebih rentan terhadap penyakit, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya produktivitas dan tingginya angka kemiskinan. Sebagai akibat dari itu, peningkatan anggaran untuk sektor kesehatan diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan, baik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sumba maupun dalam mendorong produktivitas mereka. Hal ini penting karena akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dapat memperbaiki kondisi fisik dan mental, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan individu dalam berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi di daerah tersebut.

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa anggaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan IPM serta mengurangi masalah sosial dan ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan. Dalam penelitiannya, Romadoni et al., (2024) menemukan adanya pengaruh signifikan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di Kota Pontianak, yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran terbuka di wilayah tersebut. Penelitian ini mengaplikasikan metode analisis jalur (path analysis) untuk mengidentifikasi pengaruh langsung maupun tidak langsung dari alokasi anggaran sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM dan pengangguran. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun anggaran pada kedua sektor tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, pengaruh langsungnya terhadap pengangguran tidak ditemukan signifikan. Dalam studi yang dilakukan oleh Darmawan et al., (2023), ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan mempengaruhi dua hal utama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran di bidang pendidikan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, sementara pengeluaran di sektor kesehatan meskipun berdampak negatif, namun tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Di sisi lain, meskipun IPM berpengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan di Kota Samarinda, pengaruh tersebut tidak ditemukan signifikan. Dengan kata lain, meskipun ada hubungan antara faktor-faktor tersebut, pengaruh yang ditimbulkan tidak selalu kuat atau konsisten.

Mahendra, (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan dan kesehatan, serta tingkat inflasi, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Sebaliknya, kemiskinan tidak menunjukkan dampak yang signifikan. Selain itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berfungsi sebagai variabel moderasi antara pengeluaran pemerintah, inflasi, dan kemiskinan terhadap IPM. Hasil temuan ini bisa dijadikan acuan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor serupa mungkin memengaruhi IPM dan tingkat kemiskinan di Sumba. Secara umum, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan memiliki peranan penting, tidak hanya dalam meningkatkan IPM, tetapi juga dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan memperbaiki kualitas dan akses pendidikan serta layanan kesehatan, masyarakat dapat lebih mudah meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini berpotensi mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada. Oleh karena itu, investasi yang cukup di sektor pendidikan dan kesehatan

sangat strategis untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendanaan yang fokus pada kedua sektor tersebut merupakan langkah penting untuk menciptakan pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di Sumba, efektivitas pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap penurunan kemiskinan masih perlu dievaluasi secara mendalam. Meskipun anggaran telah dialokasikan, hasilnya belum terlihat secara signifikan dalam penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pengeluaran pemerintah di sektor-sektor ini sudah tepat sasaran, ataukah terdapat hambatan dalam implementasi program yang menyebabkan pengeluaran tersebut tidak memberikan dampak yang diharapkan. Beberapa kemungkinan hambatan antara lain adalah tata kelola anggaran yang belum optimal, ketidakmerataan distribusi fasilitas dan tenaga kerja, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut dan mengevaluasi sejauh mana pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan telah memberikan kontribusi dalam mengurangi kemiskinan di Sumba.

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan di Sumba. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Jika pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan terbukti efektif, maka kebijakan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Namun, jika hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran ini belum memberikan dampak yang signifikan, maka diperlukan perbaikan kebijakan dan alokasi anggaran agar upaya pengentasan kemiskinan dapat lebih efektif. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi literatur akademis, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pemerintah dalam upaya pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan di Sumba.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif diterapkan untuk mengevaluasi pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta dampaknya terhadap tingkat kemiskinan di Sumba. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk menjelaskan hubungan antar variabel secara objektif, dengan mengandalkan data statistik yang terukur. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai peran sektor-sektor tersebut dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Sumba.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari kabupaten-kabupaten di Sumba, yang mencakup periode 2019 hingga proyeksi tahun 2024. Data tersebut mencakup informasi mengenai pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta tingkat kemiskinan selama beberapa tahun terakhir. Sebagai tambahan, wawancara terbatas dengan instansi terkait juga dilakukan untuk memberikan wawasan lebih dalam dan memperkuat analisis berdasarkan data yang telah diperoleh.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi data panel, yang menggabungkan data lintas waktu dan wilayah. Sebelum memulai proses regresi, langkah awal yang diambil adalah melakukan analisis deskriptif serta uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi syarat dan valid. Uji asumsi klasik ini

penting untuk mengevaluasi kelayakan model, seperti uji multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, yang mempengaruhi hasil regresi. Setelah itu, pemilihan model yang paling tepat dilakukan dengan mengandalkan uji Chow dan Hausman. Kedua uji ini membantu dalam menentukan apakah model yang digunakan sebaiknya mengadopsi pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), atau Random Effect Model (REM), berdasarkan karakteristik data yang tersedia. Pemilihan model yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat dan dapat diandalkan.

Hasil analisis regresi akan menunjukkan pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap IPM dan pengaruh tidak langsung IPM terhadap kemiskinan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan memberi gambaran yang jelas tentang efektivitas belanja publik dalam pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan di Sumba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Riset ini menganalisa pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Sumba. Data yang digunakan merupakan data panel dari seluruh kabupaten di Pulau Sumba dalam periode 2019–2023. Sebelum dilakukan analisis regresi panel, peneliti terlebih dahulu melakukan serangkaian uji asumsi klasik dan pemilihan model regresi panel guna memastikan validitas dan reliabilitas hasil analisis.

Langkah awal dilakukan analisis deskriptif terhadap seluruh variabel, yakni pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, IPM, dan tingkat kemiskinan. Hasil statistik deskriptif menunjukkan variasi data yang cukup besar antar tahun dan antar kabupaten, yang mengindikasikan bahwa model panel cocok untuk digunakan. Tidak ditemukan outlier ekstrem yang bisa mendistorsi hasil regresi. Untuk memastikan bahwa data layak dianalisis menggunakan regresi linear panel, dilakukan tiga uji asumsi klasik.

Setelah uji asumsi dilakukan, tahap berikutnya adalah melaksanakan uji Chow untuk menentukan pilihan antara model *common effect* dan *fixed effect*. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil uji menunjukkan bahwa model *fixed effect* lebih sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini. Sebagai langkah lanjutan, uji Hausman digunakan untuk membandingkan efektivitas model *fixed effect* dengan *random effect*. Dari hasil uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* adalah model yang paling optimal, karena menghasilkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Nilai ini menandakan bahwa estimasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan tidak mengandung bias. Dengan demikian, model *fixed effect* dipilih sebagai model terbaik untuk penelitian ini.

Setelah model ditetapkan, analisis regresi data panel dengan pendekatan efek tetap dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang ada. Berdasarkan hasil regresi, seluruh hipotesis yang diajukan terbukti signifikan. Pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan menunjukkan pengaruh positif terhadap IPM, dengan koefisien sebesar 0,421, nilai t sebesar 3,87, dan p-value 0,001. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan dapat memperbaiki kinerja pembangunan manusia, khususnya dalam aspek pendidikan, seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, yang merupakan elemen utama dalam mengukur IPM.

Pengeluaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk sektor kesehatan memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil analisis regresi menunjukkan koefisien sebesar 0,337, nilai t sebesar 2,45, dan p-value 0,017, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi anggaran kesehatan, semakin baik pula

harapan hidup dan kualitas kesehatan masyarakat Sumba, yang menjadi elemen penting dalam penghitungan IPM. Dengan kata lain, pembiayaan kesehatan yang lebih besar memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, temuan lain juga mengungkapkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Koefisien regresi yang diperoleh adalah -0,519 dengan nilai t sebesar -4,12 dan p-value 0,000, yang mengindikasikan hubungan yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai IPM, semakin rendah tingkat kemiskinan yang ada, karena IPM mencerminkan kualitas hidup yang lebih baik yang berdampak pada pengurangan kemiskinan.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan manusia, baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun pendapatan, secara langsung berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Artinya, semakin tinggi IPM suatu kabupaten, semakin rendah persentase penduduk miskinnya. Rincian hasil regresi panel ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Panel (*Fixed Effect Model*)

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai t	p-value	Kesimpulan
Pengeluaran Pendidikan → IPM	0,421	3,87	0,001	Signifikan Positif
Pengeluaran Kesehatan → IPM	0,337	2,45	0,017	Signifikan Positif
IPM → Tingkat Kemiskinan	-0,519	-4,12	0,000	Signifikan Negatif

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, (2025).

Berdasarkan keseluruhan hasil pada tabel 1, dapat disimpulkan bahwa ketiga rumusan masalah penelitian terjawab secara empiris. Pengeluaran pemerintah baik di sektor pendidikan maupun kesehatan terbukti secara statistik mampu mendorong peningkatan IPM, dan IPM yang lebih tinggi terbukti secara signifikan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil ini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan pembangunan berbasis manusia merupakan strategi yang relevan dan efektif untuk mengatasi kemiskinan di wilayah tertinggal seperti Sumba.

Pembahasan

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa investasi pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki dampak yang jelas terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pada akhirnya turut mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Temuan ini tidak hanya menjawab semua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, tetapi juga menegaskan bahwa fokus pada pembangunan manusia menjadi salah satu strategi yang sangat efektif dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini terutama relevan untuk daerah-daerah yang tertinggal, seperti Pulau Sumba, di mana akses terhadap layanan dasar masih terbatas. Dengan demikian, kebijakan yang mengutamakan sektor pendidikan dan kesehatan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut.

Mengacu pada hasil regresi, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap IPM. Temuan ini menegaskan kembali pandangan dalam *Human Capital Theory* (Becker & Schultz dalam Nizar and Nazir 2020), yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan

investasi strategis untuk meningkatkan produktivitas individu. Pendidikan yang lebih baik membuka akses ke pekerjaan layak, meningkatkan daya adaptasi terhadap perubahan ekonomi, dan memperluas partisipasi sosial. Secara empiris, temuan ini didukung oleh studi Febrianto and Astrid (2023) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan di Indonesia secara signifikan mempengaruhi IPM di tingkat provinsi. Penelitian Mongan (2019) juga membuktikan bahwa anggaran pendidikan berdampak positif terhadap kualitas pembangunan manusia di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Hasil serupa ditemukan dalam studi di ASEAN oleh Miranda-Lescano et al. (2023), yang menekankan pentingnya pendidikan dalam mengangkat dimensi pendidikan IPM secara regional. Penelitian ini juga mendukung pemikiran Amartya Sen tentang “pembangunan sebagai kebebasan”, di mana pendidikan merupakan bentuk *social opportunity* yang memperluas pilihan hidup individu (Gumelar and Qomar 2025). Selain itu, dari sudut pandang *Public Goods Theory*, pendidikan—terutama pendidikan dasar—mengandung eksternalitas positif yang besar, sehingga pembiayaannya menjadi tanggung jawab negara.

Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan juga terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan dengan sektor pendidikan. Meskipun demikian, hal ini tetap menunjukkan bahwa alokasi dana untuk sektor kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan kualitas manusia secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan bahwa kesehatan yang baik menjadi salah satu faktor penentu bagi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik dalam masyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Mongan (2019) dan studi di NTB oleh Taquiuddin et al. (2020), yang menyimpulkan bahwa peningkatan belanja kesehatan publik berdampak signifikan terhadap peningkatan harapan hidup masyarakat. Secara teoritis, hal ini sesuai dengan kerangka Human Capital yang menempatkan kesehatan sebagai aset produktif. Semakin sehat populasi, semakin tinggi kapasitas produktivitas dan partisipasi ekonomi mereka. Teori Amartya Sen juga mengafirmasi bahwa kesehatan adalah *instrumental freedom*—tanpa kesehatan, individu tidak bisa menjalani kehidupan yang bernilai, terlepas dari kebebasan formal lain yang mereka miliki. Namun demikian, studi dari beberapa daerah juga menunjukkan bahwa efek pengeluaran kesehatan bisa tidak signifikan jika hanya terfokus pada layanan kuratif atau infrastruktur besar tanpa disertai pendekatan preventif dan promotif (Miranda-Lescano et al. 2023). Oleh karena itu, efektivitas pengeluaran kesehatan sangat bergantung pada jenis intervensi yang dipilih dan bagaimana distribusinya menyentuh masyarakat secara luas, terutama di daerah terpencil seperti Sumba.

Hasil regresi menampilkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan IPM yang mencerminkan perbaikan dalam pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, terbukti menurunkan jumlah penduduk miskin. Temuan ini konsisten dengan studi Rosyadah (2021) di Nusa Tenggara Timur dan penelitian oleh Permana and Pasaribu (2023) yang menyimpulkan bahwa kenaikan IPM secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan. IPM sebagai indikator agregat kualitas hidup mencerminkan akumulasi modal manusia yang memungkinkan individu untuk menghindari atau keluar dari kemiskinan. Peningkatan rata-rata lama sekolah meningkatkan keterampilan kerja, kesehatan yang baik menurunkan risiko kehilangan produktivitas, dan pendapatan per kapita memastikan daya beli terhadap kebutuhan dasar. Dalam konsep *Capability Approach*, hal ini berarti bahwa masyarakat Sumba tidak hanya “diberi bantuan”, tetapi diberi kemampuan untuk bertahan dan berkembang. Secara teoritis, hasil ini mengonfirmasi bahwa kemiskinan bukan semata-mata soal kekurangan pendapatan, melainkan hasil dari deprivasi multidimensi. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus fokus pada

peningkatan kualitas manusia secara holistic, bukan hanya transfer bantuan atau kebijakan ekonomi sektoral.

Secara umum, hasil penelitian ini selaras dengan temuan-temuan sebelumnya baik di tingkat lokal, nasional, maupun regional. Namun, kontribusi unik dari penelitian ini adalah fokus pada konteks geografis Sumba yang mewakili daerah tertinggal dan terisolasi. Di sini, efektivitas pengeluaran publik tidak hanya diuji secara statistik, tetapi juga secara praktis, apakah anggaran yang besar benar-benar mampu menjangkau kebutuhan dasar masyarakat.

Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah: (1) Pemerintah perlu mempertahankan dan mengoptimalkan anggaran pendidikan dan kesehatan dengan penekanan pada efektivitas dan pemerataan; (2) Prioritas program harus mengarah pada intervensi yang memberi dampak langsung terhadap IPM, terutama pendidikan dasar dan kesehatan preventif; dan (3) IPM harus dijadikan indikator utama dalam evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan.

SIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa alokasi dana pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pada gilirannya berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan di Pulau Sumba. Pengaruh terbesar berasal dari sektor pendidikan, menegaskan pentingnya investasi pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan manusia. Temuan ini mendukung pendekatan multidimensional dalam pengentasan kemiskinan, di mana peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan berbasis bantuan langsung atau pertumbuhan ekonomi semata.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah memprioritaskan alokasi anggaran secara strategis pada sektor pendidikan dan kesehatan dengan memperhatikan efisiensi, pemerataan, dan kualitas implementasi program. Upaya peningkatan IPM harus diintegrasikan ke dalam kebijakan pengentasan kemiskinan agar strategi pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memasukkan variabel tambahan seperti kualitas tata kelola, infrastruktur dasar, dan partisipasi masyarakat agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika pembangunan manusia dan kemiskinan di wilayah tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Laily Nur, and Sulaiha Nor Islamy. 2021. "Dampak Pengangguran, Pendidikan, Kesehatan, PDRB Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia." *Journal of Economics Research and Policy Studies* 1(3):132–41. doi: 10.53088/jerps.v1i3.325.
- Akbar, Ria Kartini, and Zainal Arifin. 2023. "Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2021." *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 7(01):81–94. doi: 10.22219/jie.v7i01.23860.
- Carolina, M. 2022. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Subsidi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan." *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara* 7(1).
- Darmawan, Nuriyana Indra, Eny Rochaida, and Muhammad Awaluddin. 2023. "Effect of Government Expenditure in Education Sector and Health Sector on Human Development Index and Poverty in Samarinda City." *International Journal of Research and Review* 10(8):119–25. doi: 10.52403/ijrr.20230817.

- Febrianto, Mardika, and Maria Esther Astrid. 2023. "Pengaruh Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3(2):2841–50. doi: 10.25105/jet.v3i2.17787.
- Gumelar, S., and S. Qomar. 2025. "Pembangunan Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Konsep Dan Implikasi Terhadap Pembangunan Di Indonesia." *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1(3):260–69. doi: 10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.149.
- Hafiz, M., and Anggi Putri Kurniadi. 2024. "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Barat." *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 8(2). doi: 10.15548/jebi.v8i2.864.
- Idris Thahir, Muhammad, Baharuddin Semmaila, and Aryati Arfah. 2021. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Takalar." *Journal of Management Science (JMS)* 2(1):61–81. doi: 10.52103/jms.v2i1.323.
- Izzah, Citra Islamiatus, and Ignatia Martha Hendarti. 2021. "Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, Dan Pdrb Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Jawa Tengah." *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*. doi: 10.23969/oikos.v5i2.3392.
- Mahendra, A. 2020. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan, Inflasi Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 174–86. doi: 10.54367/jmb.v20i2.1010.
- Marianti, R., and R. Fillaili. 2022. "Keluar Dari Kemiskinan Di Timor Barat: Memahami Mobilitas Sosial Dan Dinamika Kemiskinan Di Wilayah Yang Terkena Konflik." 3125.
- Miranda-Lescano, Ronald, Leonel Muinelo-Gallo, and Oriol Roca-Sagalés. 2023. "Human Development and Decentralization: The Importance of Public Health Expenditure." *Annals of Public and Cooperative Economics* 94(1):191–219. doi: 10.1111/apce.12373.
- Nizar, Nefo Indra, and Ahmad Nazir. 2020. "Faktor Human Capital Pada Pertumbuhan Ekonomi Kreatif." *Jurnal Mandiri : Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi* 4(1):52–65. doi: 10.33753/mandiri.v4i1.103.
- Permana, Handika, and Esti Pasaribu. 2023. "Pengaruh Inflasi, Ipm, Ump Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Pulau Sumatera." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 7(3):1113–32. doi: 10.31955/mea.v7i3.3516.
- Romadoni, Verdianti, and Firman. 2024. "The Influence of Government Expenditures in the Education and Health Sectors on the Human Development Index and Its Impact on the Open Unemployment Rate in Pontianak City for the 2010-2022 Period." *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance* 3(1):54–70. doi: 10.58355/organize.v3i1.64.
- Rosyadah, Jihan Aqilah. 2021. "Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)." *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics* 4(1):1080–92. doi: 10.15294/efficient.v4i1.41076.